

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA

Dr. Jiuhardi, S.E., M.M.

Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Coal is a natural resource of Indonesia to be used as well as possible for the prosperity of the people and not for the welfare of a few people. The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) programs in Kutai Kartanegara regency in order to improve the welfare of society. This study used qualitative approach that seeks to generate data and information that are reliable and valid. Using the appropriate method for the analysis of matters relating to government policy, funding sources and models of CSR programs. From this study it appears that: 1. In general, program of Corporate Social Responsibility (CSR) has been carried out by the Company; 2. The implementation of CSR programs produce a positive impact on improving the welfare of people in and around the mine area; and 3. Government policy towards CSR program conceptually adequate but not optimal in order of implementation.

Keywords : *Coal; CSR (Corporate Social Responsibility); Government Policy; Mine Area.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan sudah terkenal di penjuru dunia bahwa kekayaan sumber daya alam tersebar di seluruh penjuru nusantara dan sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain, kekayaan berupa minyak dan gas, batu bara dan bahan tambang lainnya.

Kekayaan alam tersebut adalah milik rakyat Indonesia, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk umatnya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kandung dan tersirat pada masing-masing Sila Pancasila dan tertumpu pada Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang 1945 Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Dalam hal ini, kemakmuran rakyat diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu, cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang

banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak demikian, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Sedangkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan industri batubara Indonesia mengalami lonjakan yang pesat dalam 10 tahun belakangan ini. Sampai tahun 1997 produksi batubara hanya 13,2 juta metrik ton dan meningkat 3 kali lipat atau 243 persen pada tahun 2007 menjadi 53,3 juta metrik ton. Tahun 2007 Indonesia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ke 7 dan menempati posisi ke 2 sebagai eksportir batubara dengan total ekspor 202 juta metrik ton. Penerimaan negara dari sektor batubara terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 2.57 trilyun pada tahun 2004 menjadi 8,7 trilyun pada tahun 2007. Dan pada tahun 2009 kontribusi batubara lebih dari 10 trilyun. (Setia Wirawan, 2011)

Batu-bara yang merupakan sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran hanya beberapa orang saja, oleh karena itu produksi dan pengelolaan batu bara, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pengusaha, tidak boleh dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Pemerintah sebagai pemegang amanah memberikan ijin usaha pertambangan (KP) kepada pengusaha yang melakukan penambangan batu bara di Kalimantan Timur dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengusaha yang memenuhi persyaratan diberi ijin kuasa pertambangan batu bara di Kaltim. Saat ini terdapat 1.212 kuasa pertambangan yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 32 izin dari pemerintah pusat.

Daerah dengan kuasa pertambangan terbanyak Kabupaten Kutai Kartanegara, 687 izin. Di Kota Samarinda bahkan terbit 76 kuasa pertambangan yang luas konsesinya menghabiskan 71 persen wilayah. Saat ini lahan yang sedang ditambang seluas 38.814 hektar atau separuh lebih dari 71.823 hektar luas Samarinda. Balikpapan, Tarakan, dan Bontang, tidak menerbitkan satu kuasa pertambangan pun (Setiawan, 2010).

Selanjutnya, hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta mengatakan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan tidak melakukan CSR dan sebanyak 209 atau 55,75% perusahaan yang melakukan CSR.

CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangat tergantung pada keinginan manajemen perusahaan itu sendiri dan perusahaan tambang batu bara berskala besar, yang mendominasi pertambangan di Kutai Kartanegara rata-rata berdomisili di Jakarta dan bahkan kantor pusatnya di sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga ada diantara mereka yang masuk katagori yang tidak melaksanakan CSR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi riil program CSR di Kabupten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan program CSR di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

II. Tinjauan Pustaka

A. Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara factual aksinya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Menurut Suharto (2008), dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *Sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Bruntland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga focus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*.

Dalam perkembangannya, konsep CSR tidak memiliki definisi tunggal karena implementasi dan penjabaran CSR di berbagai perusahaan yang berbeda-beda. Beberapa definisi CSR diantaranya:

- a. Versi Bank Dunia:

“*CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*”

- b. Versi Uni Eropa:

“*CSR is concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basis.*”

Menurut Warta Pertanian (2004), CSR adalah tanggungjawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan serta ekonomi.

Menurut Nuryana (2005) dan Emil Salim (2007) dalam Sumardiyono, E. (2007), CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan berdasarkan kesukarelaan dan kemitraan dan menyebutkan bahwa perusahaan di masa sekarang dan ke depan harus memperhatikan tiga prinsip keseimbangan, yakni profit perusahaan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan alam atau lingkungan hidup.

Kepedulian sosial perusahaan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak – *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik

perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Menurut (Supomo, 2004), *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders relative* berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya, tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. Dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders* dalam sala proiritasnya. Sementara itu, *stakeholders* dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau *Procter & Gamble* adalah para *costumernya*.

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Wibisono (2007). Nursahid (2006) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholder*-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan.

Wibisono (2007) menjelaskan beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR, yaitu:

1. Sekedar basa-basi atau keterpaksaan. Perusahaan mempraktikkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena *external driven* (factor eksternal), *environmental driven* (karena terjadi masalah lingkungan dan *reputation driven* karena ingin mendongkrak citra perusahaan);
2. Sebagai upaya memenuhi kewajiban (*compliance*);
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*).

Menurut Saidi (2004) dan Tanudjaja (2008) membagi CSR menjadi 4 model, yaitu keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Sementara itu, Wibisono (2007) menjelaskan bahwa penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan.

Menurut Wibisono (2007), manfaat bagi perusahaan yang berupaya menerapkan CSR, yaitu dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan: “*Continuing commitment by business to behave ectically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. (Adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis beroperasi

secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat dan sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas).

Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008a).

Walaupun definisi CSR tidak mempunyai definisi tunggal, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan pengertian, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan (konsep *economic sustainability*, *environment sustainability* dan *social sustainability*).

Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga mengembangkan kualitas komunitas dan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat

(Paul Wachtel, 1989), timbulnya bermacam-macam patologi sosial, dikarenakan orientasi pembangunan yang selalu menekankan pada pertumbuhan (*growth*) bukan pada pendistribusian hasil pembangunan dengan merata dan adil.

Wachtel berpendapat bahwa orientasi ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan, telah menumbuhkan mental pertumbuhan (*Growth mentality*) yang membuat orang mengkomulasi material sebanyak-banyaknya, dengan tidak memperdulikan orang lain yang sangat membutuhkannya tetapi tidak berkesempatan. Wachtel mengemukakan hasil penelitiannya pada masyarakat Amerika, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup berbanding terbalik akumulasi kekayaan. Makin meningkat jumlah kekayaan yang dimiliki, makin meningkat pula jumlah permasalahan sosial, dan semakin tidak bahagia kehidupan manusia.

Pola pikir (*mind set*) orang berubah, untuk mengejar dan mengkomulasikan materi sebanyak-banyaknya, karena keyakinan bahwa materi yang banyak akan memberikan kepuasan hidup. Kondisi ini akan membuat orang hanya berorientasi pada dirinya sendiri dan kurang memikirkan kesejahteraan orang lain.

Perusahaan yang ada di tengah masyarakat, bila tidak membangun jaringan sosial (*social network*) dengan masyarakat sekitarnya akan menimbulkan *ekklusivisme* di tengah-tengah masyarakat, maka cepat atau lambat akan terjadi konflik sosial yang mengganggu sistem operasional perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, selain perusahaan yang bersangkutan melakukan investasi bisnisnya, diharapkan juga bagian dari itu adalah investasi modal sosial sebagai sesuatu yang merekat antara perusahaan dengan lingkungan.

Bila tidak ada jaringan sosial (*social network*) yang menumbuhkan kepercayaan (*trust*) antara masyarakat dan dunia usaha. Pertumbuhan jaringan (*social network*) yang kemudian menumbuhkan saling percaya inilah yang disebut dengan investasi modal sosial atau investasi sosial sebagai salah satu pengaman (*seat belt*) jika satu perusahaan ingin sukses dan menang di dalam persaingan.

Moore (1989), berpendapat bahwa kelangsungan hidup bermasyarakat dan bisnis sangat tergantung pada pengakuan dan penguatan pada keanekaragaman lingkungan, dan suatu organisasi bisnis akan berusia panjang bila dia memperhatikan ekosistem bisnis yang beraneka ragam, dan membangun sinergi dengan berbagai organisasi yang merupakan komponen ekosistem tersebut.

Program pengembangan masyarakat dapat membantu pada upaya-upaya mengantisipasi gangguan-gangguan sosial yang dapat terjadi setiap saat di lingkungannya. Bentuk-bentuk gangguan ini terbagi atas beberapa skala:

1. Keresahan Sosial. Bentuk ini adalah paling dini timbulnya. Bila tidak ditangani dengan baik akan semakin membesar berupa konflik sosial (*social conflict*), terlebih lagi bila tidak mampu kita selesaikan secara tuntas akan memunculkan kerusuhan massa (*social disturbance*) yang sifatnya merusak dan meluas.
2. Kerawanan Sosial. Bentuk ini dapat diindikasikan dengan gejolak sosial yang dapat terjadi secara tiba-tiba di lingkungan dunia usaha. Proses terjadinya sangat panjang mulai dari bentuk yang masih tersembunyi (*latent*) sampai pada bentuk yang nyata. Oleh karena itu, kepekaan terhadap kerawanan sosial (*hazard*) akan sangat membantu dalam pencegahan dini.

Menurut Ife (1995) ada 22 (dua puluh dua) prinsip dalam pengembangan masyarakat, beberapa prinsip yang mendasar yaitu:

1. *Integrated Development*. Ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan dengan aspek lainnya.
2. *Human Right*. Kegiatan pengembangan harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik.
3. *Sustainability*. Sustainability ini mengandung pengertian pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari kegiatan yang direncanakan.
4. *Empowerment*. Pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
5. *Self-reliance*. Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat dari pada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja.
6. *Organic Development*. Untuk bisa berkembang membutuhkan lingkungan kondisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang unik. Untuk itu percepatan perkembangan masyarakat hanya bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam pengertian ditentukan oleh kondisi dan situasi pada masyarakat.

7. *The Integrity of Process*. Proses di dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak, berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar.
8. *Cooperation*. Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struktur yang kooperatif, mengingat proses pengembangan masyarakat dilakukan dalam kondisi yang harmonis dan tanpa kekerasan. Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan, karena dalam prosesnya terjadi saling melengkapi dan saling belajar.
9. *Participation*. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasidari berbagai kelompok masyarakat.

C. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan bermula dari kata *sejahtera* yang berarti aman sentosa, makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Istilah 'sosial' berasal dari kata bahasa Latin; *socius* yang berarti kawan atau teman.

Kesejahteraan sosial di dalam berbagai bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial dewasa ini lebih ditujukan guna mencapai produktivitas yang maksimum, setiap masyarakat perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan kemampuan, melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan dan masalah-masalah yang dapat mengurangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki.

Ada beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial (Sumarnugroho T,1987:28-33)

- a. Arthur Dunham :
"Kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan".
- b. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux :
"Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat".
- c. Walter A. Friedlander :
"Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk

membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat”.

d. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

“Kesejahteraan sosial adalah suatu yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbalebalik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar supaya memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial”.

e. UU NO. 11 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 (1):

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Semua kegiatan di bidang kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain.

Adapun ciri-cirinya antara lain:

1. Organisasi formal. Kegiatan di bidang kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal. Pertolongan dan pelayanan modern merupakan bentuk pertolongan yang sifatnya berbeda dengan kegiatan pertolongan tradisional. Kegiatan kesejahteraan sosial modern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial yang telah diakui masyarakat, memberikan layanan sosial secara teratur, dan pelayanan sosial tersebut merupakan fungsi utamanya.
2. Sumber Dana Sosial. Mobilisasi sumber-sumber merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai keseluruhan dalam arti dapat disediakan oleh pemerintah atau masyarakat atau secara bersama-sama. Mekanisme yang dapat dilaksanakan menurut keinginan masyarakat merupakan bagian penting bagi usaha kesejahteraan sosial. Bagi lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah, mekanismenya harus mencerminkan keinginan pemerintah, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan perwakilan pemerintah.
3. Untuk Kebutuhan Manusia Secara Fungsional. Tujuan kebutuhan kesejahteraan sosial itu harus memandang kebutuhan-kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja.

Thelma Lee Mendoza mengemukakan bahwa ada tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumber dana yang sangat terbatas), yaitu:

1. Tujuan yang bersifat Kemanusiaan dan Keadilan Sosial (*Humanitarian and Social Justice Goals*). Berdasarkan tujuan ini, usaha Kesejahteraan sosial banyak diarahkan pada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling mempunyai ketergantungan;

kelompok yang paling ditelantarkan; ataupun kelompok yang tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri

2. Tujuan yang terkait dengan Pengendalian Sosial (*Social Control Goal*). Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhinya kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu maupun kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan).
3. Tujuan yang terkait dengan Pembangunan Ekonomi (*Economic Development Goal*). Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang dapat diberikan, ataupun berbagai sumber daya yang lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi (Rukminto Adi, Isbandi, 1994: 6-9).

D. Penelitian Terdahulu

1. Jalal, Lingkaran Studi CSR (2012). “Lebih Mudah Masuk Surga Daripada Masuk Perusahaan Ini!” Kesempatan Kerja sebagai sumber konflik dan Peluang dan Tantangan Hubungan Perusahaan dan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Masalah pokok yang dihadapi CSR antara lain:
 - 1) Hal pertama yang bisa dilakukan perusahaan di sini adalah memastikan adanya kuota kerja untuk masyarakat setempat. Perusahaan bisa memulainya dengan memetakan mana saja bentuk--bentuk pekerjaan yang memang sudah dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, serta mana yang berpotensi bisa dilakukan oleh masyarakat lokal di masa mendatang. Apabila perusahaan memang akan berada di suatu tempat dalam jangka panjang, puluhan tahun, maka sesungguhnya seluruh bentuk pekerjaan berpotensi bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, dalam jangka pendek perusahaan perlu untuk memusatkan perhatian kepada apa yang memang sudah bisa dilakukan oleh mereka.
 - 2) Kedua, perusahaan perlu melakukan diskriminasi positif. Manakala dalam suatu rekrutmen ditemukan dua atau lebih kandidat yang memiliki kapasitas yang sama, maka perusahaan harus mengambil kandidat yang lebih dekat tempat tinggalnya dengan wilayah operasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan *proximity* sebagai salah satu atribut pemangku kepentingan. Bagaimanapun, mereka yang tinggal lebih dekat memang memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal lebih jauh. Risiko yang diterima masyarakat yang tinggal lebih dekat dengan wilayah operasi perusahaan memang lebih tinggi, sehingga wajar kalau perusahaan mengupayakan prioritas untuk mereka.
 - 3) Ketiga, transparansi dalam rekrutmen harus diupayakan hingga level tertinggi yang mungkin. Dalam hal ini, penting untuk memberikan kejelasan mengenai segala hal terkait peluang kerja itu sendiri, dalam berbagai moda komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat lokal. Pada berbagai kasus yang baik, bisa dipelajari bahwa moda komunikasi yang terbaik digunakan adalah sebanyak yang biasa

dimanfaatkan oleh masyarakat. Papan pengumuman di halaman perusahaan yang bisa diakses masyarakat memang dibutuhkan, terutama kalau masyarakat sudah terbiasa mencari informasi ke tempat itu. Namun, bentuk lain yang populer juga adalah informasi di kantor desa dan kecamatan.

- 4) Keempat, perusahaan perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat setempat, melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini terutama sangat diperlukan manakala perusahaan berminat untuk berada di suatu tempat dalam jangka panjang. Kalau perusahaan hanya akan berada dalam jangka pendek-misalnya untuk menambang selama 5 tahun-maka Investasi dalam Peningkatan kapasitas Masyarakat tak Perlu dilakukan.
- 5) Kelima, ketika perusahaan sudah menerima anggota masyarakat lokal sebagai pekerjanya-apalagi yang bersifat permanen-maka perusahaan sangat perlu mencurahkan perhatian kepada mereka. Karena status pemangku kepentingan ganda yang mereka miliki, yaitu sebagai pekerja dan sebagai anggota masyarakat lokal, maka perhatian khusus memang merupakan keniscayaan. Berbagai permasalahan yang diungkapkan di bagian terdahulu: perasaan memulai dari bawah, perasaan terdiskriminasi, dan perasaan karier yang tak kunjung jelas perkembangannya harus dipantau dan dikelola.

b. Pertumbuhan CSR dipengaruhi oleh tiga pilar yaitu:

- 1) Pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas.
- 2) Kedua, mengkalkulasi kapasitas sumberdaya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR.
- 3) Ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha.

Kalau seluruh hal di atas bisa diwujudkan oleh perusahaan, maka baik perusahaan maupun masyarakat bisa bersama-sama memasuki gerbang “surga” hubungan yang harmonis.

2. Menurut Susanto (2007), penilaian terhadap program CSR bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. Disamping itu juga bertujuan agar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR secara berkesinambungan, tidak bersifat parsial. Penilaian CSR juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang yang ada sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

Penilaian CSR yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai hal-hal:

- a. Nilai-nilai dan etika perusahaan
- b. Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktivitas CSR
- c. Isu-isu penting seputar CSR yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan
- d. Stakeholders kunci
- e. Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam hal mengimplementasikan program CSR yang terintegrasi
- f. Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki

g. Aktivitas-aktivitas berkaitan dengan CSR yang tengah berjalan.
Tahapan-tahapan dari pelaksanaan penilaian CSR adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk tim kepemimpinan CSR
- b. Merumuskan definisi program CSR
- c. Melakukan diskusi dengan stakeholder-stakeholder utama
- d. Menciptakan sebuah kelompok kerja untuk membangun komitmen
- e. Menyiapkan draf awal komitmen
- f. Mengkonsultasikan dengan stakeholder yang terkena dampak
- g. Merevisi dan menerbitkan komitmen

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan komitmen CSR sebagai berikut:

- a. Membangun sebuah struktur pengambilan keputusan CSR yang terintegrasi
- b. Menyiapkan dan mengimplementasikan rencana bisnis CSR
- c. Menetapkan sasaran yang terukur dan mengidentifikasi pengukuran kinerja
- d. Melibatkan karyawan dan juga pihak-pihak lain yang menjadi sasaran dari komitmen CSR
- e. Merancang dan menjalankan pelatihan mengenai CSR
- f. Membangun mekanisme guna memberikan perhatian terhadap perilaku yang problematis
- g. Melakukan penelitian terhadap dokumen, proses dan aktivitas perusahaan
- h. Mengidentifikasi dan melibatkan stakeholder kunci

III. Metodologi Penelitian

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif tentang Teori yang berupaya menghasilkan data dan informasi yang dapat dipercaya, valid.

B. Metode dan Desain

Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Metode yang relevan dengan analisis data dan membuat desain yang relevan juga dalam hal menganalisis, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sumber dana dan model program CSR.

C. Teknik dan Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kegunaan dalam penelitian ini menggunakan data:

- a. Data primer yang langsung diperoleh peneliti di lapangan, baik melalui pengamatan, diskusi, wawancara/tanya jawab terhadap masyarakat maupun pihak Pemerintah dan Pihak Perusahaan serta lembaga swadaya masyarakat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, laporan pemerintah dan hasil penelitian peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data pendukung lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah kembali sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian ini. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam bentuk tabel, angka atau gambar sesuai dengan kajian penelitian ini.

Data yang diperoleh, diproses sesuai dengan kebutuhan penelitian antara lain:

- a) *Coding*, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda dimaksud dapat berupa angka ataupun huruf.
- b) *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah ada kekeliruan dalam pengisian atau data yang ada masih kurang lengkap, palsu tidak sesuai dan sebagainya. Dengan editing diharapkan akan diperoleh data yang benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c) *Tabulating*, terutama untuk data yang berbentuk angka dan penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, serta gambar. Bagi data sekunder tidak dilakukan lagi pengolahan lebih lanjut karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.
- d) Data narasi sebagai data kualitatif yang bersumber dari data yang berbentuk jawaban berupa cerita atau argumentasi dari pedagang serta unit-unit kerja pemerintah yang terkait.
- e) Analisis data yaitu mengadakan analisis terhadap variabel yang dipakai dalam penelitian ini, sehingga dapat memberi penjelasan terhadap variable lainnya, mengadakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Barat serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga- Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalir sungai terpanjang yaitu Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Kutai Kartanegara berbatasan dengan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara yaitu Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Sedangkan danau berjumlah sekitar 16 buah, danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dengan luas 13 000 hektar.

Kutai Kartanegara di tahun 2010 terdiri atas 227 Desa/Kelurahan yang semuanya merupakan Desa/Kelurahan swadaya. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun lalu (2009) yaitu 227 desa/kelurahan. Pada tahun 2010, jumlah Linmas di Kutai Kartanegara adalah 5.782 orang. Jumlah ini berbeda dengan tahun sebelumnya

(2009) yang hanya sebesar 5.019 orang. Ini berarti bahwa jumlah linmas mengalami peningkatan sebanyak 763 orang atau 15,02 persen.

B. Produsen Batu Bara

Dengan banyaknya kandungan batu bara di wilayah Kutai kertanegara, telah mendorong banyak perusahaan dalam berbagi bentuk untuk terlibat dalam proses penambangan. Sebagian besar perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berjumlah sebesar 40.85%, perusahaan yang berbentuk CV sebesar 45.12% dan sisanya berbentuk koperasi/KUD dengan 14.02%.

C. Perubahan Kondisi Sosial

Dari hasil penilitia ini tampak bahwa terdapat pengaruh terhadap kondisi masyarakat di lingkungan daerah pertambangan (Tabel 4.1.). Dari keseluruhan penduduk tersebut: sebagian besar penduduk merasa tidak mengalami perubahan sama sekali dengan 40.15%, sedangkan 19.23% merasa perubahan kearah yang lebih baik. Sebesar 33.26% penduduk merasa kondisi mereka menjadi lebih buruk.

Tabel 4.1 : Perubahan Kondisi Sosial

No.	Perubahan Kondisi Sosial	Persentase
1	Lebih baik	19,23
2	Sama saja	40,15
3	Lebih buruk	33,26
4	Tidak tau	7,36

Sumber: Data Pengolahan dari penelitian lapangan 2012

D. Sumber Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan dapat merasakan manfaat dari perusahaan dalam beberapa bentuk (Tabel 4.2.). Dari hasil penelitian ini tampak bahwa: 20.25% penduduk memperoleh kesejahteraan dalam bentuk CSR, kesempatan bekerja di perusahaan sebesar 20.75%, peluang memiliki sumber usaha 18.15%, kegiatan-kegiatan non CSR sebesar 15,35% dan reboisasi, reklamasi dan revegetasi di lahan tambang adalah 20.65%.

Tabel 4.2 : Sumber Kesejahteraan Dari Masyarakat

No.	Sumber	Persentase
1	CSR	20,25
2	Kesempatan Kerja	20,75
3	Peluang Usaha	18,15
4	Banyak Membantu Masyarakat (non CSR)	15,35
5	Reboisasi, Reklamasi dan Revegetasi	20,65
6	Lain-lain	4,85

Sumber: Data pengolahan dari penelitian lapangan 2012

E. Permasalahan Sosial Di Lokasi Perusahaan

Keberadaan perusahaan di suatu tempat sering menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian ini, dimana konflik yang sering terjadi terdiri atas:

a. Konflik masyarakat dengan perusahaan

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar disebabkan beberapa hal yaitu: 1. Pembebasan lahan sebesar 28,65%, 2. Rekrutmen tenaga kerja sebesar 19,12%, 3. Peluang usaha (pemasok) sebesar 12.45%, 4. Limbah perusahaan 25.70% dan 5. Lain-lain sebesar 14.08%

b. Konflik masyarakat dengan masyarakat.

Konflik yang terjadi antara sesama masyarakat sekitar lahan pertambangan pun sering terjadi. Data yang diperoleh adalah: 1. Perebutan lahan tumpang tindih sebesar 25.17%, 2. Masyarakat lokal dan pendatang sebesar 20.65%, 3. Kesempatan kerja 15.15%, 4. Kesempatan berusaha adalah 7.45%, 5. Kecemburuan sosial sebesar 15.25%, 6. Bantuan perusahaan yang tidak merata sebesar 10.05%, dan 7. Masalah lainnya sebesar 6.28%.

c. Konflik masyarakat dengan pemerintah desa.

Dari hasil penelitian tampak adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa setempat. Beberapa penyebabnya adalah: 1. Surat tanah yang tumpang tindih sebesar 40.35%, 2. Dugaan keberpihakan Pemerintah Desa kepada perusahaan sebesar 20.80%, 3. Pemberian ijin penggunaan fasilitas umum seperti jalan adalah 15.15%, 4. Pembagian bantuan yang tidak adil yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebesar 10.45%, dan 5. Lain-lain sebesar 13.25%.

d. Konflik perusahaan dengan lingkungan.

Keberadaan perusahaan tambang menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan yaitu: 1. Kebisingan sebesar 10.15%, 2. Air minum, cuci dan mandi tercemar sebesar 19.15%, 3. Menciptakan lubang-lubang besar di beberapa area tambang sebesar 17.79%, 4. Banyaknya jalan yang rusak disebabkan kendaraan berat milik perusahaan sebesar 7.23%, 5. Hilangnya flora dan fauna di daerah tambang sebesar 14.32%, 6. Meningkatnya polusi debu sebesar 15.18%, dan 7. Banjir sebesar 16.18%.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi dengan keberadaan perusahaan membutuhkan peran serta banyak pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dari data penelitian tampak bahwa konflik-konflik yang terjadi tersebut diselesaikan di beberapa tingkatan, yaitu: 1. Perorangan dengan perorangan 7.43%, 2. Tingkat RT sebesar 25.32%, 3. Tingkat desa sebesar 35.45%, 4. Kecamatan dan polsek sebesar 25.70%, 5. Kabupaten dan kapolres sebesar 5.35%, dan 6. Lain-lain adalah 0.75%.

V. Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara umum telah dilakukan oleh Perusahaan dengan baik. Tambang Batu Bara, namun sebagian kecil saja yang melaksanakan dengan baik, sebagian besar masih kurang dan bahkan terkesan pelaksanaannya asal-asalan, hal tersebut disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang mampu dan aturan tentang pelaksanaan CSR itu belum jelas. Masih ada perbedaan pandangan, baik Pemerintah, Perusahaan maupun masyarakat.

2. Pelaksanaan program CSR berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan tambang, melalui kesempatan kerja, peluang usaha dan pelaksanaan program CSR serta usaha lainnya yang berkaitan dengan kehadiran tambang batu bara.
3. Kebijakan pemerintah terhadap Program CSR secara konseptual umumnya sudah memadai namun pada tatanan implementasinya belum optimal, oleh karena itu perlu di evaluasi dan pengawasan yang dilakukan terus menerus oleh Pemerintah, Model program CSR di Kutai Kartanegara ada dua pola, yaitu:
 - a. Model atau pola terstruktur, yaitu dalam program yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi.
 - b. Model atau pola tidak terstruktur, yaitu pola yang dananya disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang sukar di prediksi sebelumnya misalnya akibat bencana banjir, bantuan untuk warga yang sakit dan lain sebagainya.
4. Sumber dana program CSR dialokasikan oleh masing-masing Perusahaan sesuai dengan kemampuannya dan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan perusahaan dari sumber daya alam yang dihasilkan.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya diadakan perbaikan tentang rencana, program dan pelaksanaan serta monitoring program CSR, dan baik di tatanan konsep maupun di tatanan pelaksanaannya sehingga program CSR menjadi sumber dan jalan bagi masyarakat menuju “yang kaya semakin kaya yang miskin menjadi kaya”.
2. Penelitian ini merupakan penelitian awal dan masih banyak kekurangannya untuk itu diperlukan penelitian lanjutan, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2004. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Humaniora, Bandung.
- Apuy, M. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Pertambangan Batubara PT. Mahakam Sumber Jaya di Wilayah kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda*, Tesis. Samarinda.
- Budimanta, Arif. 2003. “Prinsip-Prinsip Community Development” Dalam *Akses Peran Serta Masyarakat, Sinar haqrapan dan Indonesia Cnter for Sustainable Development*. Jakarta
- Cahyat, A., Gonner C dan Michaela Haugh. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan kesejahteraan Rumah Tangga. Sebuah Panduan dengan contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. CIFOR. Bogor.
- Cavaye, Jim. 2001. *Understanding Community Development*. Cavaye. Community Development.
- Chambers R.1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal)*. Memahami Desa Secara Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- Cook, James. B. 1994. *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. Of Community Development, University of Missouri – Columbia.
- Ishak, AF., 2007. *Business Sector's Involvement on Community Empowerment Programs in Kabupaten Kutai Timur*. Bahan Seminar. www.kutaitimur.go.id
- Giarci, G.G. 2001. Caught in Nets: A Critical Examintaion of the Use of the Concept of "Network" in Community Development Studies, *Community Development Journal* Vol.36 (1): 63-71, January 2001. Oxford University Press.
- Green, Gary P &Haines Anna, 2002. *Asset Building and Community Development*. Thousand Oaks; Seage Publication Inc.
- Ife, Jim W. 1995. *Community Development: creating community alternatives – vision analysis and practice*. Melbourne : Longman.
- Matulada, H.M. 1995. *Lingkungan Hidup Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Purba, Jhonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosial*. Yayasan Obor, Jakarta
- Rudito, Bambang dan Budimanta, Arif. 2003. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Penerbit. ICSD.Jakarta
- Rudito, Bambang; Arif Budimanta; Adi Prasetijo.2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. ICSD. Jakarta
- Sadikin, A. 2009. Implementasi Program "Community Development" Pada Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara PT. Trubaindo Coal Mining di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
- Sardjono, M.A. 1996^a. Pemantauan Perkembangan Sosekbud Desa Binaan Pemegang HPH di Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. PPLH-Unmul. Samarinda
- Sardjono, M.A. 1996^b. *Diagnosis Kebijakan dan Implementasi Studi Diagnostik Pembinaan Masyarakat Desa Hutan*. Fahutan Unml-SFMP-CGIF. Samarinda.
- Sardjono, M.A. 1996. *Dinamika Sosekbud Masyarakat Desa Binaan Pengusaha Hutan di Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*. PPLH-Unmul. Samarinda.
- Purba, J. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Suharto, E. 2008. *Menggagas Standar Audit Program CSR*. Makalah disampaikan ada 6th Round Table Discussion "Menggagas Standar Audit Program CSR: Implementasi UU perseroan Terbatas, Aosisasi Auditor Internal (AAI), Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008.
- Wibisono, Yusuf (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik. Fascho Publishing.